

## DAFTAR BACAAN

### 1. Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar 1945.

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (LN 1960 No. 104, TLN No. 2043).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (LN 1996).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (LN 1998 No. 182, TLN No. 3790).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (LN 2014 No. 3, TLN No. 5491).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 untuk perubahan yang pertama dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 untuk perubahan yang kedua (LN 2011 No. 82, TLN No. 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN 2014 No. 244, TLN No. 5587).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang (LN 2007 No. 68, TLN No. 4725).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) (LN 2020 No. 91, TLN No. 6487).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (LN. 1964 No. 112, TLN No. 2702).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (LN. 2021/No.31, TLN No. 6633)

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (LN 2020 No. 98).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BN 2015 No. 2036).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (BN 2020 No. 1601).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BN 2014 No. 2043).

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5).

## **2. Buku:**

Harsono, Boedi, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), Jakarta.

Kumala, Yudha Cahya, 2021, *Lelang Indonesia (Serba serbi Lelang dan Pelaksanaanya di Indonesia)*, Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), Sleman-Yogyakarta.

Naja, Daeng, 2019, *Pembiayaan Takeover Oleh Bank Syariah*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

M. Arba, Diman Ade Mulada, 2021, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Purnamasari, Irma Devita, 2010, *Kiat Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa PT. Mizan Pustaka, Bandung.

Redi, Ahmad, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.

### 3. Jurnal:

Citra Ayu Kishardian Salsabilla, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P., Sarah Hastriani, "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Prespektif Aristoteles", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022, h. 1-25.

Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 1 (Maret) 2013, h. 143-178.

Dinalara Dermawati Butarbutar, "Mengatasi Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai", *Pakuan Law Review*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015.

Heru Kuswanto, Risna Diani, "Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo", *E-Jurnal The Spirit of Law*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016, h. 15-30.

Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit bank Konvensional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Volume 47 Tahun 2017, h. 134-149.

Janri Wolden Halomoan Sirait, "Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha", *JIANA*, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2017, h. 132-141.

Lesia Fatma Ginoga, Asty Khairi Inayah Syahwani, "Analisis Dampak NPL, CKPN, LDR dan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2022, h. 49-58.

Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, delegasi dan Mandat", *Khasanah Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Nomor 3 Volume 2 Tahun 2020, h. 92-99.

Muhammad Fikri Hanafi, Sunny Ummul Firdaus, "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia", *Sovereignty-Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022, h. 79-83.

Oddy Inayah Kassi, Listyowati Sumanto, “Penggunaan Kuasa Untuk Menjual di Dalam Praktek Jual Beli Tanah”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, h. 1-16.

Riana Hapsari, “Penerapan Prinsip 3R (Restructuring, Reschedulling, Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Akan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”, *Darmasiswa*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2021.

#### 4. Website:

Adella, Fransiska, “Kredit: Pengertian, Jenis, hingga prinsipnya”, <https://www.finansialku.com/definisi-kredit/> diakses pada 13 Januari 2020.

Aditya Mardiartuti, “Arti Tugas Perbantuan dalam Pemerintahan”, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6216859/arti-tugas-pembantuan-dalam-pemerintahan> diakses 05 Agustus 2022.

Alamsyah, Suma Anio Lui, “Memahami 3 Asas Hukum: Lex superior, Lex spesialis, lex posterior”, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/> diakses 22 November 2022.

Bimo Prasetyo, Risky Dwinarto, “Bagaimana Bank Melakukan Ayda?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-bank-melakukan-ayda--lt4dbe6ff9a16fd/> diakses 8 Juni 2021.

Bunga, Gabriela, “Apa itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)?” <https://kfmap.asia/blog/apa-itu-rencana-tata-ruang-wilayah-rtrw/1484> diakses 27 Agustus 2021.

Dewi Aminatuz Zuriyah, “Ini Penyebab banyaknya PHK selama wabah Corona”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200403/12/1222309/ini-penyebab-banyaknya-phk-selama-wabah-corona>, diakses 03 April 2020.

Direktorat Jenderal Tata Ruang-Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Tata Ruang, “Perencanaan Tata Ruang: Pengertian dan Jenis”, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3736> diakses 13 Mei 2023.

- Ibnu, "NPL: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Masalah yang Bisa Ditimbulkan", <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/npl/> diakses 12 Mei 2022.
- Lusianah, "Kredit Macet: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasinya" <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/20/kredit-macet-pengertian-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya/> diakses 20 Desember 2020.
- Muskibah, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia" <https://www.metrojambi.com/kolom/13528319/Kedudukan-Hukum-Adat-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia>, diakses 31 Agustus 2019.
- Nadia, Siska, "Keberadaan Kutipan Risalah Lelang", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15109/KEBERADAAN-KUTIPAN-RISALAH-LELANG.html> diakses 15 Juni 2022.
- Nurhantanto, Arifin, "Hambatan Proses Balik Nama Objek Lelang Hak Tanggungan Tanah Sawah (Pertanian)", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12806/Hambatan-Proses-Balik-Nama-Objek-Lelang-Hak-Tanggung-Tanah-Sawah-Pertanian.html> diakses 06 Mei 2019.
- Oktavira, Bernadheta Aurelia, "Apa itu Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Cara Eksekusinya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-grosse-akta-pengakuan-utang-dan-cara-eksekusinya-lt61b2f672adaa9/> diakses 10 Desember 2021.
- Prada, Regina, "Informasi Penting Seputar Hak Guna Bangunan, Anda Tahu!", <https://eticon.co.id/hak-guna-bangunan/> diakses 25 April 2022.
- Rafa Syawalia R., "NPL adalah: Pengertian, Perhitungan & Faktor Memengaruhi NPL" <https://landx.id/blog/npl-adalah-pengertian-perhitungan-npl-faktor-memengaruhi-npl/> diakses 06 Oktober 2022.
- Riadi, Muchlisin, "Lelang/Penjualan Umum (Pengertian, Fungsi, Jenis, Asas dan Prosedur)" <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/lelang-pengertian-fungsi-jenis-asas-dan-prosedur.html> diakses 16 Mei 2020.
- SIP LAW FIRM, "Kenali, Prinsip dan asas hukum Perbankan Indonesia", <https://siplawfirm.id/kenali-prinsip-dan-asas-hukum-perbankan-indonesia/?lang=id>, diakses pada 5 Juni 2023.

Tim Hukumonline, “Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e/?page=1> diakses 7 Oktober 2019.

Widodo, Josep Henokh, “Hak Atas Tanah yang Dapat Dimiliki Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing di Indonesia”, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/hak-hak-atas-tanah-yang-dapat-dimiliki-warga-negara-asing-atau-badan-hukum-asing-di-indonesia/> diakses 20 Juli 2022.